Pengantar Edisi Perdana

Alhamdulillahirabbil'aalamiin. Rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah karena berkat karunia hidayah, ilmu dan mau'nah-Nya, akhirnya **Teraju, Jurnal Syariah dan Hukum** hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Semangat kehadiran **Teraju** ini tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Kehadiran **Teraju** bertujuan untuk turut berkontribusi dalam kajian ilmiah pada bidang keilmuan syariah dan hukum yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dengan kekhasan kajian dalam bidang keislaman dan kemelayuan. **Teraju** selalu berupaya untuk menghadirkan naskah artikel sesuai dengan kekhasan bidang keilmuan tersebut sekaligus memperkokoh keberadaan STAIN Sultan Abdurrahman dalam kancah pemikiran, penelitian dan pengabdian di bidang ilmu syariah dan hukum.

Pada edisi perdana ini, terdapat lima naskah artikel dari hasil seleksi atas beberapa naskah yang masuk ke tim redaksi sesuai dengan *scopes* kajian. Artikel tersebut sebagai bagian kajian normatif dan sebagai refleksi atas problematika hukum kontemporer. Dua naskah kajian normatif seperti tulisan Hariyun Sagita dan Zakki Abdillah yang menggali norma dan nilai-nilai hukum Islam melalui Al-Quran dan Hadis. Kedua tulisan tersebut hadir dengan mencoba memberikan perspektif baru dalam memaknai teks agama tanpa mengurangi nilai-nilai yang termaktub di dalamnya. Sedangkan tiga tulisan lainnya yakni sebagai refleksi dan sumbangsih konseptual atas fenomena hukum yang terjadi di Indonesia. Seperti artikel Habib Ismail yang mengetengahkan kajian tentang wakaf dari studi lapangan di daerah Lampung, Maylisabet perihal hukum waris dan fenomenanya yang terjadi di Indonesia dengan telaah normatif atas aturan perundang-undangan yang ada, dan kajian Almahfuz yang mengupas perihal Pancasila dalam sebuah paradigma keberagamaan. Tentu saja kami berharap sumbangsih tulisan tersebut menambah khazanah pengetahuan bersama.

Akhir kata, kami dari pengelola jurnal **Teraju** mengucapkan terima kasih kepada tim redaksi, khususnya reviewer dan editor, serta para penulis yang telah berkontribusi signifikan dalam mewujudkannya. Besar harapan kami, kehadiran **Teraju** bisa memberikan manfaat bagi kajian keislaman, keilmuan dan kemelayuan dari perspektif syariah dan hukum. *Selamat membaca.* []

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

SUSUNAN REDAKSI

Pemimpin Redaksi

Mohamad Tedy Rahardi

Manajer Redaksi

Muhammad Ilham

Editor

Aris Bintania

M. Zamhari

Abd. Rahman

M. Taufiq

Mitra Bestari

Fikri

(Institut Agama Islam Negeri Parepare)

Muhammad Rezi

(Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi)

Penyunting Bahasa

Fadhilah Yonanta

Siti Maheran

Design Grafic & Layout

Eko Riyadi

IT SUPPORT

Unyil

TERAJU adalah jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September. Teraju mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.

DAFTAR ISI

Halaman	Artikel
I - III	Pengantar Redaksi, Susunan Redaksi dan Daftar Isi
1 - 8	Hukum memperebutkan kekuasaan dalam perspektif Al-Qur'an <i>Hariyun Sagita dan Abd. Rahman</i>
9 - 20	Hukum waris dalam kompilasi hukum Islam perspektif filsafat hukum (studi analisis terhadap bagian warisan ahli waris) <i>Maylissabet dan Kudrat Abdillah</i>
21 - 27	Studi tematik tentang konsep keadilan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis <i>Zakki Abdillah</i>
29 – 36	Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Lampung Selatan <i>Habib Ismail, Haris Santoso dan Teguh Arifin</i>
37 - 43	Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan antarumat beragama di Indonesia <i>Almahfuz</i>

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 1 Nomor 1, Maret 2019

Hukum waris dalam kompilasi hukum Islam perspektif filsafat hukum (studi analisis terhadap bagian warisan ahli waris)

Maylissabet

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumberduko Pakong Pamekasan
mayli.tsabit@gmail.com

Kudrat Abdillah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura
dratlah2024.ka@gmail.com

Abstrak

Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak. Indonesia mempunyai Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hukum waris Islam, yang berisi pembahasan tentang ahli waris dan bagian warisan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pembaharuan hukum waris yang belum ada pada masa sebelumnya, seperti pembagian harta waris untuk anak angkat, orang tua angkat, dan ahli waris non-muslim. Hal ini menjadikan penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan kacamata filsafat hukum. Hukum Kewarisan Indonesia menggunakan mazhab hukum sosiologi. Mazhab hukum sosiologi sesuai dengan keadaan masyarakat karena sangat mempertimbangkan adat yang ada di masyarakat.

Kata kunci: *Hukum Waris, Kompilasi Hukum Islam, Filsafat Hukum.*

Abstrac

Islamic Inheritance Law is a law that regulates heritage treasure someone who has passed away and given to the beneficiary. Indonesia has set the Compilation of Islamic Law Islamic law of inheritance, such as heirs and inheritance. In the Compilation of Islamic Law, there are several updates to the law of inheritance that do not

have in the past, such as the division of the estate for the adopted child, the adoptive parents, and non-Muslim heirs. It makes the writer feel compelled to study deeper the Islamic law of inheritance in Islamic Law Compilation by using glasses philosophy of law. Indonesian Inheritance Law uses a school of sociology law. The school of sociology law is in accordance with the conditions of the community because it takes into account the existing customs in the community.

Keywords: *Law of Inheritance, Islamic Law Compilation, Philosophy of Law.*

Pendahuluan

Setiap masalah yang dihadapi oleh manusia ada hukumnya (wajib, sunat, haram, makruh, atau *mubah*), di samping ada pula hikmahnya atau motif hukumnya. Namun, hanya sebagian kecil saja masalah-masalah yang telah ditunjukkan oleh al-Qur'an atau sunnah dengan keterangan yang jelas dan pasti (*clear* dan *fix statement*), sedangkan sebagian besar masalah-masalah itu tidak disinggung dalam al-Qur'an atau sunnah secara eksplisit, atau disinggung tetapi tidak dengan keterangan yang jelas dan pasti.

Hal yang demikian itu tidak berarti Allah dan Rasul-nya lupa atau lengah dalam mengatur syariat Islam. Justru itulah menunjukkan kebijakan Allah dan Rasul-nya yang sangat tinggi atau tepat dan merupakan *blessing in disguise* (berkah yang tersembunyi) bagi umat manusia. Masalah-masalah yang belum atau tidak ditunjukkan oleh al-Qur'an atau sunnah itu diserahkan kepada pemerintah, ulama, atau cendekiawan muslim, dan *ahlul balli wal 'aqdi* (orang-orang yang punya keahlian menganalisis dan memecahkan masalah) untuk melakukan pengkajian atau ijtihad guna menetapkan hukum, yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.¹

¹Muhammad Sallam Madkur, *Al-Magkhal lil Fikih al-Islami*, (Cairo, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1960), 211-212. Selanjutnya untuk memahami/mencari hikmah di balik ketetapan

Salah satu ilmu dalam Hukum Islam adalah Hukum Kewarisan (Hukum Waris). Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an atau sunnah dengan keterangan yang konkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai *ijma'* (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Misalnya kedudukan suami istri, bapak, ibu, dan anak (lelaki atau perempuan) sebagai ahli waris yang tidak bisa tertutup oleh ahli waris lainnya dan juga hak bagiannya masing-masing. Contoh permasalahan tentang kewarisan adalah anak angkat dan orang tua angkat tidak mendapat bagian dari harta waris. Adanya tulisan ini penulis mengharapkan pembaca bisa memahami filsafat hukum dalam melihat hukum waris Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pembahasan

1. Hubungan Antara Hukum dengan Filsafat.

Hukum yang dijadikan objek studi bagi para akademisi, sesungguhnya mempunyai banyak pengertian. Dalam pengertian hukum menurut Rahardjo, hukum adalah

suatu hukum Islam, *vide* M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 380-404.

institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.² Sementara filsafat atau disebut juga dengan ilmu filsafat mempunyai objek bahasan yang sangat luas, meliputi semua hal yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia dan berusaha memahami dunia dalam hal makna.

Pada mulanya ilmu yang pertama kali muncul adalah filsafat, kemudian ilmu-ilmu khusus (antara lain ilmu hukum) menjadi bagian dari filsafat. Dengan demikian ada yang mengatakan filsafat sebagai induk atau ibu dari ilmu pengetahuan atau *matter scientiarum*. Karena objek material filsafat sangat umum, yaitu seluruh kenyataan, padahal ilmu-ilmu membutuhkan objek material yang khusus, hal ini berakibat berpisahnya ilmu dari filsafat. Meskipun dalam perkembangannya masing-masing ilmu memisahkan diri dari filsafat, hal ini tidak berarti hubungan filsafat dengan ilmu-ilmu khusus menjadi terputus.³

Interaksi antara filsafat dengan ilmu-ilmu khusus menyangkut suatu tujuan yang lebih jauh dari filsafat. Filsafat berusaha untuk mengatur hasil-hasil dari berbagai ilmu-ilmu khusus ke dalam suatu pandangan hidup dan pandangan dunia yang tersatupadukan, komprehensif, dan konsisten. Secara komprehensif artinya tidak ada suatu bidang yang berada di luar jangkauan filsafat. Secara konsisten, artinya uraian kefilsafatan tidak menyusun pendapat-pendapat yang saling kontradiksi. Misalnya dalam kehidupan masyarakat,

pengertian demokrasi harus sama, tidak boleh kontradiksi dengan pemahaman demokrasi di dalam pemerintahan. Jadi filsafat dalam hal ini mampu menjangkau makna yang lebih dalam daripada pemahaman dalam konsep yang ada dalam ilmu hukum.⁴

2. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Ide awal pembentukan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI) itu sebenarnya ada pada tahun 1970-an, yaitu setelah lahirnya UU No.14 Tahun 1970, terutama mengenai maksud pasal 10 ayat (1) nya. Pasal ini mengamanatkan tentang adanya kedudukan Pengadilan Agama yang kuat dalam sistem nasional, juga mempunyai kesetaraan dengan tiga pengadilan lainnya di Indonesia, juga ditentukan bahwa aspek organisatoris, administratif, dan finansial berada dibawah kekuasaan Departemen Agama (kini disebut Kementerian Agama), sedang aspek yudikatif berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁵ Maka pihak Kementerian Agama dan Mahkamah Agung merasa berkepentingan untuk mempersiapkan tugas masing-masing terutama menyangkut hukum acara dan hukum materilnya. Khususnya menyangkut hukum materilnya direncanakan melahirkan kitab pedoman hukum yang sifatnya unifikatif, yaitu adanya satu pedoman hukum yang seragam untuk semua Pengadilan Agama, dan kodifikatif, yaitu kitab pedoman hukum tersebut bersifat tertulis, dan terhimpun

²Rahardjo, *Hukum Progresif, Penjelajahan Suatu Gagasan, Makalah pada acara jumpa alumni program Doktor UNDIP*, 4 September 2004, 1.

³Ali Mudzofir, *Filsafat Ilmu, Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, (Klaten: Intan Pariwara, 1997), 15.

⁴Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 5.

⁵Dr. Pagar, M. Ag, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 1995), 12.

dalam satu kitab hukum formal, yaitu KHI.⁶

KHI sebagai kitab hukum formal yang unifikatif dan kodifikatif tersebut sangat diperlukan dan sifatnya segera, mengingat pada masa sebelumnya tidak terdapat keseragaman keputusan antar Pengadilan Agama. Para hakim senantiasa berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan meskipun dalam kasus yang sama. Kenyataan seperti ini terjadi hampir merata pada setiap persoalan. Dengan kenyataan ini maka prinsip kepastian hukum kurang terealisasi dengan baik.⁷

Kompilasi Hukum Islam akhirnya muncul dengan bentuk Inpres Tahun 1991. Banyak pembaharuan yang ada di dalam KHI. Berbagai pembaharuan dilakukan agar segala persoalan dalam Islam bisa menemukan solusinya. Bentuk-bentuk pembaharuan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, seperti taklik *talak* (pasal 45), pengaturan harta bersama/*gono-gini* (pasal 85-97), ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) untuk cucu yatim (pasal 185), *wasiat wajibah* untuk anak dan orang tua angkat (pasal 209) serta harta hibah yang diperhitungkan sebagai warisan (pasal 221), bisa dijadikan sebagai contoh sekaligus aplikasi pendekatan terpadu hukum Islam dan sosial ini.

Sejauh pengetahuan penulis, semua bentuk pembaharuan tersebut telah banyak terinspirasi sekaligus merupakan kreasi hukum Indonesia karena berhadapan dengan realitas

sosial dan kultural yang benar-benar menjadi *living law* di masyarakat. Realitas sosial yang tumbuh dalam masyarakat sangat melekat dan tak mudah dipisahkan. Semisal pembahasan harta hibah orang tua kepada anaknya yang kemudian -ketika orang tua tersebut meninggal- harta hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan bagi anak yang bersangkutan.

Kata “hibah” adalah bentuk *masdar* dari kata *وهب* yang artinya memberikan.⁸ Secara istilah, pengertian hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi atau akad tanpa mengharap imbalan apapun dari orang yang diberi ketika pemberi masih hidup.⁹ Sedangkan dalam rumusan KHI pasal 171 huruf (g), disebutkan:

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang cakap tanpa adanya unsur paksaan. Hal itu disebutkan dalam pasal 210 ayat (1) dan (2) KHI: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki (ayat 1). Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (ayat 2).

Mengenai hibah orang tua kepada anaknya yang selanjutnya diperhitungkan sebagai harta warisan

⁶Dr. Pagar, M. Ag, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia, Kajian Terhadap Sisi Keadilan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CitaPustaka, 2007), 44.

⁷Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta :Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1998), h. 128.

⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), 1584.

⁹As-Sayyid as-Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, Cet. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), III: 388.

belum pernah ditemukan pembahasannya dalam literatur kitab-kitab fikih. Ringkasnya, hal ini merupakan suatu fenomena baru dalam konteks pemikiran hukum Islam. Di Indonesia sendiri, persoalan ini hanya dapat ditemukan dalam hukum adat, sebuah realitas sosial-kultural empiris di masyarakat kita.

Hilman Hadikusuma menyebutkan dalam hukum adat, penerusan harta warisan yang bersifat individual -seperti dalam hukum waris Islam- kepada para ahli waris dapat terjadi sebelum pewaris wafat maupun sesudahnya. Terjadinya penerusan harta warisan ketika pewaris masih hidup, di kalangan keluarga Jawa disebut "lintiran". Hal ini berlaku melalui penunjukan dalam bentuk *hibah-wasiat* tertulis maupun tidak tertulis yang berupa pesan dari orang tua (pewaris) kepada ahli warisnya. Penunjukan itu dilakukan dengan cara menentukan harta warisan tertentu kepada ahli waris tertentu, atau dengan menunjukkan batas-batas tanah pertanian, atau dengan menunjukkan jenis barangnya. Sedangkan di Aceh, apabila dilakukan wasiat, maka harta yang dapat dipesankan bagi ahli waris tertentu tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah seluruh warisan. Jika terjadi kelebihan, maka ketika diadakan pembagian warisan, bagian yang lebih itu dapat ditarik kembali.¹⁰

Dalam persoalan hibah sebagai warisan ini, KHI mengkonstruksikannya secara tegas menjadi ketentuan hukum Islam yang

positif. Dalam pasal 221¹¹, apabila kita perhatikan lebih jauh, maka terobosan baru KHI dalam bidang kewarisan ini ternyata mendasarkan diri pada realitas sosial yang hidup disekelilingnya, yaitu fenomena aksi kolektif berupa *hibah wasiat*. Meminjam inferensi historis Louay Safi, dapat dijelaskan bahwa formulasi (*istinbath*) hukum tersebut juga dilakukan dengan memasukkan analisis empiris terhadap fenomena *hibah wasiat*, dengan mengungkapkan motif dan tujuannya, yaitu mendistribusikan keadilan ekonomis dan menjaga perdamaian di antara anak-anaknya. Muatan pasal 221 KHI yang bertendensi untuk mendistribusikan keadilan bagi para ahli waris berarti sesuai dengan asas hukum kewarisan Islam, yaitu asas keseimbangan dan asas keadilan.¹² Sedangkan sistem aturannya direkonstruksi sesuai dengan aturan (*Furud al-Muqaddarah*) dalam hukum waris Islam.

Sebagian pakar beranggapan bahwa penyerahan semacam ini dipandang sah dalam hukum Islam, karena sesungguhnya dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari kemungkinan adanya rasa ketidakadilan di kalangan anak-anaknya.¹³ Para orang tua biasanya memberikan bagian-bagian tertentu dari hartanya kepada

¹¹Bunyi Pasal 221 KHI: Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

¹²Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), 71-84.

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 1982), 154. Idem, "Corak Lokal dalam Hukum Positif Islam di Indonesia: Sebuah Tinjauan Filosofis", dalam Cik Hasan Bisri (peny.), *Hukum Islam dalam Tataanaan Masyarakat Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Logos, 1998), 154.

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Mandar Maju, 1992), 215-217.

anak-anaknya yang telah berkeluarga. Kemudian, ketika orang tua meninggal maka harta tersebut diperhitungkan sebagai warisan, dengan ketentuan jika kurang maka dapat ditambah. Sebaliknya, jika dipandang lebih – sepanjang tidak merugikan orang lain – dapat dikembalikan.¹⁴

3. Bagian Harta Waris Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris pada Bab III mulai Pasal 176 sampai Pasal 191. Pasal-pasal tersebut mengatur besarnya bagian harta waris untuk ahli waris secara rinci. Dari pasal-pasal tersebut dapat penulis simpulkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

SERAB / HUBUNGAN	AHLI WARIS	SYARAT	BAGIAN	DASAR HUKUM	
A Perkawinan (yang masih terikat status)	1. Istri/ Janda	Bila tidak ada anak/cucu	1/4	Al-Qur'an / An-Nisa'	12
	2. Suami/ Duda	Bila tidak ada anak/cucu	1/2	Al-Qur'an / An-Nisa'	12
	3. Anak Perempuan	Bila tidak ada anak/cucu	1/4	Al-Qur'an / An-Nisa'	12
	4. Anak Laki-Laki	Bila tidak ada anak/cucu	1/2	Al-Qur'an / An-Nisa'	12
B Nasab / Hubungan Darah	1. Anak Perempuan	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	2/3	Al-Qur'an / An-Nisa'	11
	2. Anak Laki-Laki	Sendirian atau bersama anak / cucu lain (laki-laki atau perempuan)	2/3	Al-Qur'an / An-Nisa'	11
	3. Ayah Kandung	Bila tidak ada anak / cucu	1/3	Al-Qur'an / An-Nisa'	11
	4. Ibu Kandung	Bila tidak ada anak / cucu	1/3	Al-Qur'an / An-Nisa'	11
C Asbab / Hubungan Lain	1. Saudara Laki-Laki kandung atau saudara perempuan kandung	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak / cucu DAN tidak ada ayah kandung	1/3	Al-Qur'an / An-Nisa'	11
	2. Saudara Perempuan kandung atau saudara laki-laki kandung	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak / cucu DAN tidak ada ayah kandung	1/3	Al-Qur'an / An-Nisa'	11
	3. Cucu / Keturunan (anak saudara)	Menyampaikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti	1/3	Al-Qur'an / An-Nisa'	11
	4. Asnaf / Orang Lain	Menyampaikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti	1/3	Al-Qur'an / An-Nisa'	11

Harta peninggalan sebelum dibagi sebagai harta waris terlebih dahulu harus diselesaikan masalah hutang piutang pewaris (yang meninggal) dan biaya pemakaman serta wasiat yang diperbolehkan (bila ada).

Di samping itu bila si mayit meninggalkan istri (janda) atau suami (duda) dan masih terikat perkawinan perlu dipisahkan lebih dahulu antara harta bawaan (harta yang dipunyai sebelum menikah) dan harta bersama (harta yang diperoleh setelah pernikahan atau harta gono-gini). Sesuai dengan hukum adat bahwa harta bersama/gono-gini dibagi menjadi dua bagian, separuhnya adalah milik suami dan separuhnya milik istri.

Jadi yang menjadi harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhis), pembayaran hutang, dan pemberian kerabat (Pasal 171 butir e KHI).

Kerabat yang tidak memperoleh bagian waris, yaitu anak angkat atau orang tua angkat dapat memperoleh bagian sebagai hibah (ketika pewaris masih hidup) atau sebagai *wasiat wajibah*, atau diberi bagian yang tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan sesuai ketentuan pasal 194 s/d 214 KHI. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (pasal 183). Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan (pasal 188).

4. Nilai Filosofis Kompilasi Hukum Islam

Setiap pemikiran filosofis berbeda dari pemikiran dalam tataran

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*,

ilmu khusus, termasuk dalam Hukum Kewarisan Islam. Terdapat banyak variasi aturan kewarisan, yang di dalam masing-masing aturan itu dianggap sudah mengandung nilai keadilan. Dalam tataran ilmu, rumusan pasal atau bunyi ketentuan Kompilasi Hukum Islam langsung bisa diterapkan pada kasus konkret kehidupan masyarakat. Hazairin melihat lebih jauh lagi dari sekedar hukum positif dan tataran ilmu.

Rasio Hazairin sesungguhnya adalah dengan menggunakan metode-metode filsafat untuk mengusahakan diperolehnya nilai keadilan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa lepas dari prinsip dasar. Pembeneran itu tidak didasarkan pada metode-metode kerja ilmiah yang ada di dalam tataran ilmu hukum, akan tetapi lebih luas dari itu. Dengan kata lain sudah mencapai pada taraf filosofis.¹⁵

Adapun dari segi filsafat, Kompilasi Hukum Islam menurut Hazairin sebagai satu kesatuan pemikiran dan melahirkan pula satu keyakinan yang dianggapnya benar dengan dasar-dasar pembeneran yang kuat, dapat diterangkan dengan menggunakan ilmu filsafat.

a. Ontologi¹⁶

Ontologi merupakan landasan metafisis dari setiap pemikiran filsafat. Kompilasi Hukum Islam dalam uraian tentang keadilan memunyai prinsip dasar, yaitu adanya keadilan Tuhan. Keadilan itu ada dan bersumber pada Tuhan. Hal ini merupakan prinsip

ontologi keadilan dalam pemikiran Hazairin. Prinsip yang demikian, merupakan pandangan metafisis yang menjadi landasan bagi semua uraian keadilan dan unsur-unsurnya sebagai hasil refleksinya terhadap seluruh realitas konkret lingkungan fakta sosiologis, antropologis, dan nilai-nilai yang berkembang dengan mempertimbangkan faktor tempat, perjalanan waktu, dan keadaan.

b. Epistemologi¹⁷

Dalam epistemologi, wujud realitas keadilan itu ternyata dapat berbeda-beda terjelma dalam norma keadilan kewarisan fikih. Epistemologi yang digunakan maksudnya adalah yang berkaitan dengan hakikat kebenaran, sumber pengetahuan, dan susunan/struktur pengetahuan tentang keadilan sebagai suatu rangkaian pemikiran atas dasar landasan ontologis tersebut di atas.

Dalam tataran epistemologis ini dapat dikatakan bahwa sekalipun keadilan terdapat dalam landasan dasar ontologi yang sama, namun dalam kenyataan objektif perwujudannya dapat dalam bentuk yang berbeda-beda. Dalam penerapan hukum kewarisan Islam pada masa awal setelah Rasulullah SAW. peranan para fuqaha (mufasir) sangat menentukan dalam menetapkan norma hukum kewarisan Islam. Sebagai wujud terapannya dalam realitas kasus yang konkret dalam lingkungan sosial saat itu yang menganut pandangan patrilineal yang

¹⁵Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 198.

¹⁶Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles.

¹⁷Epistemologi, (dari bahasa Yunani *episteme* (pengetahuan) dan *logos* (kata/pembicaraan/ilmu)) adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat, misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan.

di dalamnya terkandung pula nilai-nilai yang dianggap adil bagi lingkungan masyarakatnya.

Nilai-nilai keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam diperoleh melalui proses analisis terhadap fakta-fakta sosial, baik yang langsung dihadapinya atau yang digunakannya sebagai bahan analisis dan refleksi menggunakan metode idealisasi nilai, hermeneutik, perbandingan, induksi, dan abstraksi. Pengetahuan atas adanya nilai keadilan yang diyakini benar, diperoleh dari berbagai sumber yaitu dari ilmu antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Dengan ontologi keadilan, sangat memungkinkan dapat diterapkan dalam kebutuhan dan kenyataan sosial masyarakat Indonesia. Dalam penilaiannya bahwa keadaan sosiologis dari masa beberapa waktu setelah Rasulullah di Timur Tengah dibandingkan dengan keadaan sosiologis di Indonesia adalah berbeda, dan tidak bisa disamakan semuanya.

c. Aksiologi¹⁸

Aspek-aspek nilai dalam hal ini adalah keadilan. Keadilan terdiri dari dua, yaitu keadilan statis dan keadilan dinamis. Keadilan dinamis yang dimaksud adalah keadilan yang mengikuti perkembangan masyarakat dan zaman. Keadilan dinamis akan selalu berubah dengan berubahnya waktu, tempat, dan keadaan masyarakat dimana dia tinggal.

Keadilan merupakan suatu ide, menunjukkan suatu nilai kebaikan khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang. Nilai keadilan dapat bersifat statis adalah nilai yang

terkandung di dalam wahyu, bersifat universal. Nilai keadilan yang dinamis dengan arti bahwa keadilan itu selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan. Keadilan juga memiliki implikasi nilai yang maknanya sangat ditentukan oleh peranan interpretasi hakikat nilai keadilan yang dihubungkan dengan realitas konkret yang dapat berbeda-beda dari waktu ke waktu tanpa meninggalkan landasan ontologinya.¹⁹

Mengenai Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan penilaian secara filosofis akan mendapatkan beberapa hasil:

- 1) Pergeseran makna adil dari fikih lama untuk dzawil arham²⁰ ke mawali²¹.
- 2) Aspek kedudukan antara laki-laki dan perempuan.
- 3) Garis keturunan darah laki-laki sama dengan kedudukannya dengan garis keturunan darah perempuan.
- 4) Makna kalalah.²²
- 5) Faktor sosial lain yang berpengaruh pada peranan kedudukan perempuan di dalam rumah tangga.

¹⁹Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 203.

²⁰Dzawil arham adalah para kerabat tidak berhak mendapat waris. Bila harta waris tidak ada ashhabul furudh atau 'ashabah yang mengambilnya, maka seketika itu dilimpahkan kepada baitulmal kaum muslim untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya.

²¹Mawali adalah ahli waris pengganti berhubung orang yang berhak mewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Misalnya seorang ayah meninggal lebih dahulu daripada kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris dari kakek.

²²Kalalah adalah keadaan seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan..

¹⁸Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi berasal dari kata Yunani: *axion* (nilai) dan *logos* (teori), yang berarti teori tentang nilai.

- 6) Adanya kenyataan pluralitas penarikan garis keturunan darah, yang berbeda dari kenyataan sosial di Arab yang belum diketahui oleh para mufasir atau ahli fikih dari masa ke masa beberapa waktu setelah masa Rasulullah.

5. Mazhab Filsafat Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam

Para pakar hukum memiliki pandangan yang hampir sama tentang konsep mazhab dalam filsafat hukum. Satjipto Rahardjo membagi mazhab filsafat hukum sebagai teori yunani dan romawi, positivisme dan utilitarianisme, hukum alam, teori hukum murni, pendekatan sejarah, dan antropologis, serta pendekatan sosiologis. Sedangkan Soejono Soekanto membaginya menjadimazhab utilitarianisme, mazhab sejarah, dan kebudayaan, mazhab formalitas, mazhab realisme hukum, dan mazhab *sociological jurisprudence*. Adapun Lili Rasjidi membaginya ke dalam mazhab sejarah, mazhab hukum alam, mazhab hukum positif, mazhab *sociological jurisprudence*, dan mazhab *pragmatic legal realism*.²³

Aliran *Sociological Jurisprudence* sebagai salah satu aliran pemikiran filsafat hukum menitik beratkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Aliran ini berkembang di Indonesia dan di Amerika, dipelopori oleh Roescoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo, Kantorowich, Gurvitch, dan lain-lain. Akan tetapi Romli Atmasasmita berpendapat bahwa aliran ini berasal dari Oliver Wendell Holmes (1841-1935) yang

juga menurut para teoritis merupakan tokoh terpenting dalam aliran Realisme Hukum.²⁴

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil dari perumusan hukum Islam di Indonesia dalam bidang Hukum Perkawinan dan Hukum kewarisan. Selama bertahun-tahun penelitian dan pengamatan dilakukan agar Indonesia mempunyai hukum yang mencerminkan ciri khas Indonesia, tetapi tidak menghilangkan substansi yang ada. Dalam perjalanannya, Kompilasi Hukum Islam menggunakan kajian sosiologi dengan mengamati masyarakat yang ada.

Dalam mazhab sosiologi dikenal bahwa, Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Maksudnya adalah segala aturan hukum yang ada, semestinya harus sesuai dengan kehidupan masyarakat. Harapannya agar hukum tersebut dapat digunakan dan diterapkan dalam masyarakat. Apabila hukum tidak sesuai dengan kehidupan dan karakteristik masyarakat, maka hukum tidak akan berguna lagi. Singkatnya yaitu, mazhab sosiologi konsepnya adalah hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law* baik tertulis maupun tidak tertulis.

Mazhab hukum dalam kewarisan Indonesia menggunakan mazhab hukum sosiologi. Mazhab sosiologi akan terasa sesuai dengan keadaan masyarakat, karena mazhab ini sendiri sangat menjunjung tinggi adat yang ada di masyarakat. Ketika hukum kewarisan dikaitkan dengan

²³

Lihat <http://azharnurfajaralam.blogspot.com/2013/11/aliran-aliran-dalam-filsafat-hukum.html>, diakses pada tanggal 02 Juli 2014, pukul 07:39 WIB.

²⁴Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), 37.

mazhab sosiologi, maka kewarisan yang diterapkan adalah kewarisan yang mengacu pada masyarakat. Kewarisan yang digunakan adalah kewarisan yang menjadi persetujuan masyarakat. Baik persetujuan secara tertulis, maupun secara kultural yang terserap dalam adat masyarakat.

Harapan dari mazhab sosiologi adalah terciptanya hukum yang mengacu pada keadilan dalam masyarakat. Sehingga dalam pembagian harta waris, maka asas keadilanlah yang akan dijunjung tinggi, dengan tanpa mengacu pada jumlah bagian warisan. Ketika rasa keadilan sudah dijunjung tinggi, maka dengan sendirinya kehidupan masyarakat akan berjalan dengan damai, tentram, aman, dan nyaman, saling menghormati, saling menyayangi, dan menjunjung tinggi toleransi.

Kesimpulan

Dalam pandangan filsafat, tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pedoman pokok agama Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Artinya tujuan keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua segi dan mengarah kepada keadilan dua segi pula. Dikatakan berawal dari dua segi, karena pedoman Islam berupa al-Qur'an dan Hadits. Di satu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut pandangan manusia di lain segi.

Tugas awal yang kemudian dihadapi adalah upaya formulasi al-Qur'an dan Hadits-khususnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan- agar mampu tampil sesuai dengan prinsip keadilan secara umum. Perpaduan dua segi ini diharapkan menjadi produk standar panduan mencari keadilan lewat jalur hukum. Pada akhirnya

pedoman tersebut mampu menjadi standar hukum universal yang mampu tampil di manapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- As-Sabiq as-Sayyid, *Fikih as-Sunnah*, Cet. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 1982.
- Bisri, Cik Hasan (peny.), "Corak Lokal dalam Hukum Positif Islam di Indonesia: Sebuah Tinjauan Filosofis", dalam, *Hukum Islam dalam Tataaan Masyarakat Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Logos, 1998.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1998.
- Fahrurrozi, *Paradigma Ekonomi Islam Terhadap Konsep Marketing*, EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syaria'ah & Bisnis Islam, 2016
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Mandar Maju, 1992.
- Khotibul Umam, *The Importance of Good Customer Ethics in Improving The Financing Portion of Mudharabah*,

-
- Global Review of Islamic Economics and Business, 2016.
- Kudrat Abdillah, Maylissabet, M. Taufiq, Kontribusi Bahtsul Masail Pesantren di Madura dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Kontemporer, *Jurnal Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 2019.
- Kudrat Abdillah, *Status Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial*, Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 2017.
- Madkur, Muhammad Sallam, *Al-Magkhal lil Fikih al-Islamy*, Cairo, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1960.
- Masyithah Mardhatillah, *Ayat-Ayat al-Qur'an dalam Suf Healing Method; Pengobatan Alternatif Penderita AIDS ala Muhammad Zubri*, Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis, 2015.
- Mudzofir, Ali, *Filsafat Ilmu, Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Klaten: Intan Pariwara, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: IAIN Press, 1995.
- Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia, Kajian Terhadap Sisi Keadilan Abli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CitaPustaka, 2007.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Rahardjo, *Hukum Progresif, Penjelajahan Suatu Gagasan, Makalah pada acara jumpa alumni program Doktor UNDIP*, 4 September 2004.
- Ria Astuti, Torik Aziz, *Integrasi Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini di TK Kanisius Sorowajan Yogyakarta*, Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2019.